



ARSIP. 12 24

1/4-13

## WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENNIUM  
DEVELOPMENT GOALS (RAD MDG's) KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaa Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait program percepatan pencapaian *Target Millenium Development Goals* Provinsi Jawa Tengah, perlu disusun Rencana Aksi Daerah Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 yang memuat arah kebijakan dan strategi pencapaiannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian *Target Millennium Development Goals* (RAD MDG's) Kota Semarang Tahun 2011-2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Djogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

ke

1

1

mu 9

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara. Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kota Madia Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
10. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9 );

dk

11/12  
m p

13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tanggal 17 Januari 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);
15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (RAD MDG's) KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2015**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang .
2. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Walikota adalah Walikota Semarang
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang
5. Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals yang selanjutnya disingkat RAD MDG's adalah Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals (RAD MDG's) Kota Semarang Tahun 2011-2015.

**BAB II  
RAD MDGs**

**Pasal 2**

RAD MDG's merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals* dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan.

*Handwritten marks and signatures*

Pasal 3

Dokumen RAD MDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Arah Kebijakan dan Strategi Percepatan Pencapaian Target MDG's;
- c. BAB III : Target Kinerja, Program dan Kegiatan;
- d. BAB IV : Pemantauan dan Evaluasi;
- e. BAB V : Penutup

Pasal 4

RAD MDGs menjadi pedoman Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang untuk menyusun Rencana Kerja, dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dan Pemerintah Kota Semarang dalam upaya percepatan pencapaian target *Millenium Development Goals*.

BAB III  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDG's.
- (2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD MDG's sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 1 April 2013

Pt. WALIKOTA SEMARANG  
WAKIL WALIKOTA,

  
HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH

KOTA SEMARANG

  
ADI TRIHANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2013 NOMOR 14